

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Berikut ini merupakan definisi akuntansi menurut para ahli dan daftar pustaka:

1. Menurut *American Accounting Association* (AAA), akuntansi adalah suatu proses mendefinisikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari satu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.
2. Menurut *Accounting Principles Board* seperti yang dikutip Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.
3. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), akuntansi merupakan seni pencatatan pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang segala transaksi. dan kejadian yang sedikit-sedikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya.

4. Menurut Indah Rahmawati dalam buku dasar-dasar akuntansi, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.
5. Menurut Moh Mahsun (2011) Akuntansi adalah perangkat pengetahuan sebagai hasil pemikiran para ahli (akuntan) untuk menghasilkan seperangkat informasi yang bermanfaat.

2.1.2. Jenis Akuntansi

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor swasta atau komersial dan akuntansi sektor publik.

1. Akuntansi Komersial atau Swasta

Akuntansi komersial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba. Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, seperti pemerintah untuk kepentingan pajak.

2. Akuntansi Sektor Publik

- a. Menurut Dwi Ratmono (2015) Akuntansi keuangan daerah atau akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam

rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

b. Menurut Erlina, dkk (2015) Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

3. Akuntansi sektor publik di bedakan atas:

a. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)

Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

b. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk di terapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Akuntansi sosial banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid,

puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga masyarakat.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

2.2.1. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dibilang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa masalah atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2.2.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik, pelaporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

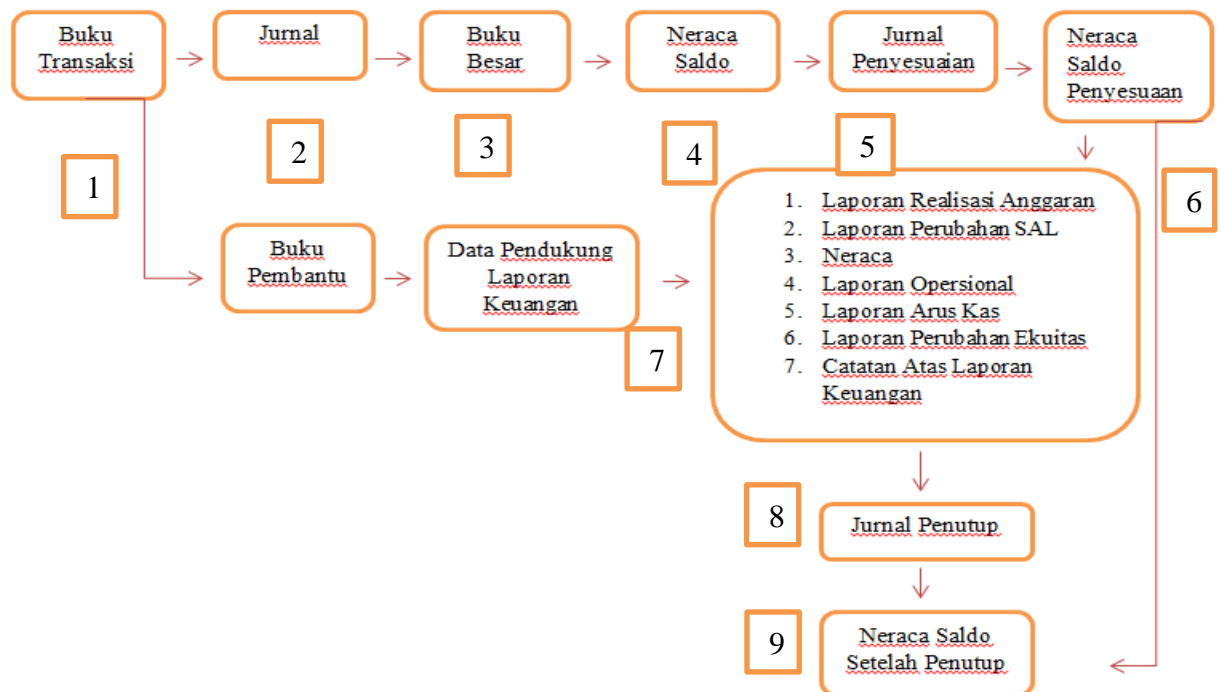
- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

2.2.3. Sistem Akuntansi

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati dalam bukunya *Warren, Reeve, Fees Accounting (2005:234)*, sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Sedangkan Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan perusahaan.”

2.2.4. Siklus Akuntansi Sektor Publik

Berikut merupakan siklus atau alur dari akuntansi sektor publik



Gambar 2.1.
Siklus Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa tahapan-tahapan siklus akuntansi sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang telah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi terbaru.
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku.

2.2.5. Basis Akuntansi Sektor Publik

Basis akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki dua macam dan basis tersebut dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi

berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual. Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 maka mulai tahun 2015, pemda mewajibkan penggunaan basis akrual.

1. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan.

2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi atau merupakan proses perubahan basis dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.

3. Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.2.6. Komponen Laporan keuangan Akuntansi Sektor Publik

Komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan

pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA terdiri dari anggaran, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

3. Neraca

Komponen yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi yang mengenai penerimaan dan pengeluaran kas daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang diamanatkan oleh PP 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013 yang wajib disusun. Dengan demikian laporan perubahan ekuitas wajib di susun dan disajikan baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bentuk laporan keuangan yang meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standart Akuntansi.

2.3. Laporan Pertanggungjawaban

2.3.1. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban

Menurut Arfan ikhsan lubis (2009) Laporan Pertanggungjawaban adalah Jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggungjawab menjalankan operasi tersebut.

2.3.2. Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban di buat oleh bendahara secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat berdasarkan pembukuan yang dibuat oleh bendahara. Laporan Pertanggungjawaban wajib

disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing dan Badan Pemeriksa Keuangan secara bulanan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan kerenaan.

2.3.3. Manfaat Laporan Pertanggungjawaban

1. LPJ tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membuat proposal kegiatan.
2. LPJ adalah dokumen atau bukti nyata yang bisa dijadikan kenangan.
3. LPJ dapat dipakai untuk laporan kepada penyumbang atau donatur agar mau untuk menyumbang lagi.
4. LPJ merupakan bukti agar tidak ada saling mencurigai terhadap penggunaan dana dalam kegiatan tertentu.
5. LPJ dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan.
6. Dengan LPJ kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan proses peningkatan kegiatan.